TATA KELOLA RISIKO KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI OBJEK WISATA GOA TENGKORAK KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Aldi Alfiannur Latief
NPP. 33.0799
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: aldi.latief6@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Nurul Mutmainnah Jamil, S.Ft, Ftr, M.Han
Email: Jamil.nurul@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Tourist safety governance in high-risk natural destinations often receives less attention than promotion and physical development. Goa Tengkorak in Paser Regency has strong historical and natural tourism value, but visitors face serious risks caused by steep karst access, damaged suspension bridge infrastructure, limited lighting, absence of operational safety standards, and weak emergency preparedness. The research gap lies in the limited discussion of collaborative risk governance for cave tourism destinations that combine adventure risk, cultural heritage, and community-based management.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze and formulate a model of tourist security and safety risk governance at Goa Tengkorak Tourist Attraction in Paser Regency.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, field observation, and documentation. Informants were selected purposively from the Paser Regency Youth, Sports, and Tourism Office, local managers or community actors, emergency-related stakeholders, and visitors with a total of six (6) informants. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model through data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The findings show that security and safety governance at Goa Tengkorak has not reflected an ideal collaborative governance model. There is no binding local regulation or specific standard operating procedure for high-risk cave tourism. Risk management is weak because hazard identification, safety briefing, visitor capacity control, personal protective equipment, and written evacuation maps are not implemented consistently. Emergency preparedness is also inadequate due to the absence of first aid facilities, medical posts, trained guides, and reliable evacuation infrastructure. The main supporting factors are the strong historical value of the Sadurengas heritage and community willingness to participate informally. The main inhibiting factors are limited mitigation budget, low technical safety competence, weak institutional coordination, and low safety culture among visitors.* ***Conclusion****: The study concludes that tourist safety governance at Goa Tengkorak remains reactive and sectoral. Paser Regency Government needs to issue a Regent Regulation on special interest tourism safety standards, rehabilitate critical infrastructure, establish a village safety task force, and provide basic emergency and vertical evacuation training for local managers.*
Keywords: *Collaborative Governance, Risk Management, Tourist Safety*

ABSTRAK

Permasalahan: Pengelolaan keselamatan wisatawan pada destinasi alam berisiko tinggi masih sering tertinggal dibandingkan promosi dan pembangunan fisik destinasi. Objek Wisata Goa Tengkorak di Kabupaten Paser memiliki nilai sejarah dan daya tarik alam yang kuat, tetapi menghadapi risiko serius akibat akses tebing yang curam, jembatan gantung yang rusak, minim penerangan, tidak adanya standar

operasional keselamatan, serta lemahnya kesiapsiagaan darurat. Kesenjangan penelitian terlihat pada terbatasnya kajian yang menempatkan wisata gua sebagai objek tata kelola risiko berbasis kolaborasi lintas aktor. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan model tata kelola risiko keamanan dan keselamatan wisatawan pada Objek Wisata Goa Tengkorak di Kabupaten Paser. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive* dari unsur Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, pengelola atau masyarakat lokal, unsur kedaruratan, dan pengunjung dengan jumlah informan sebanyak enam (6) orang. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keamanan dan keselamatan di Goa Tengkorak belum mencerminkan *collaborative governance* yang ideal. Pemerintah daerah belum memiliki regulasi turunan dan SOP spesifik untuk wisata gua berisiko tinggi. Manajemen risiko belum berjalan karena identifikasi bahaya, briefing keselamatan, pembatasan kapasitas pengunjung, penggunaan alat pelindung diri, dan peta evakuasi belum diterapkan secara konsisten. Kesiapsiagaan darurat juga lemah karena tidak tersedia fasilitas P3K, pos medis, pemandu bersertifikat, dan jalur evakuasi yang aman. Faktor pendorong utama adalah nilai historis peninggalan Kerajaan Sadurengas dan partisipasi informal masyarakat lokal. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan anggaran mitigasi, rendahnya kompetensi teknis keselamatan pengelola, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan rendahnya budaya keselamatan wisatawan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola keselamatan wisatawan di Goa Tengkorak masih reaktif dan sektoral. Pemerintah Kabupaten Paser perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang SOP keselamatan wisata minat khusus, memperbaiki infrastruktur kritis, membentuk satuan tugas keselamatan desa, serta memberikan pelatihan tanggap darurat dan evakuasi vertikal bagi pengelola lokal.
Kata kunci: Keselamatan Wisatawan, Manajemen Risiko, Tata Kelola Kolaboratif

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata alam memberikan peluang ekonomi bagi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan, pertumbuhan usaha lokal, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, pengelolaannya tidak bisa dilepaskan dari risiko keselamatan. Risiko tersebut meningkat pada destinasi berbasis gua karena wisatawan beraktivitas di ruang gelap, lembap, sempit, dan sering berada pada bentang alam curam. Keselamatan menjadi bagian inti dari mutu destinasi dan perlindungan hak wisatawan, bukan sekadar pelengkap layanan. Goa Tengkorak di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan destinasi yang memadukan nilai sejarah, alam, dan budaya. Kawasan ini memiliki sekitar 35 tengkorak manusia dan ratusan tulang belulang peninggalan masyarakat Paser pada masa Kerajaan Sadurengas, menjadikannya destinasi unik dengan daya tarik sejarah dan budaya. Namun, daya tarik ini berada dalam ruang fisik yang berisiko, termasuk jembatan gantung, jalur anak tangga menanjak, tebing karst, lorong sempit, dan area gua yang minim penerangan.

Persoalan keselamatan di Goa Tengkorak tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan regulasi, kapasitas kelembagaan, kompetensi pengelola, perilaku wisatawan, dan koordinasi antarinstansi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan merupakan hak wisatawan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pengelola destinasi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem perlindungan yang memadai, termasuk SOP, pengendalian risiko, pembatasan kapasitas, penyediaan fasilitas pertolongan pertama, dan mekanisme evakuasi. Dalam konteks perlindungan masyarakat, fungsi pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada pelayanan destinasi, tetapi juga mencakup pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, dan kesiapan menghadapi kondisi darurat melalui koordinasi lintas perangkat daerah (Eviany &

Sutiyo, 2023). Beberapa studi sebelumnya menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan pengelola lokal dalam pengembangan objek wisata berisiko tinggi. Penelitian oleh Mulyana & Fanggi (2022), dan Sumakul et al. (2021) menyoroti efektivitas fasilitas, koordinasi lintas sektor, serta hambatan anggaran dan SDM dalam tata kelola destinasi. Temuan ini menjadi dasar penting untuk merancang model tata kelola risiko dan keselamatan wisatawan yang kolaboratif dan terstruktur di Goa Tengkorak.

Penelitian ini menggunakan perspektif *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008). Pendekatan ini relevan karena pengelolaan keselamatan wisata gua membutuhkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola lokal, masyarakat, aparat kedaruratan, tenaga kesehatan, dan wisatawan. Kolaborasi yang terstruktur menjadi kunci agar pengelolaan risiko tidak berjalan sporadis atau bersifat reaktif setelah kecelakaan terjadi. Melalui pendekatan ini, penelitian menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas, komunikasi antaraktor, kepercayaan, dan mekanisme koordinasi. Pemerintah memiliki peran dalam pengaturan regulasi dan penganggaran, pengelola lokal bertugas menjalankan prosedur keselamatan di lapangan, masyarakat berperan dalam pengawasan dan edukasi wisatawan, sementara aparat kedaruratan dan tenaga kesehatan menyediakan respons darurat yang cepat dan tepat.

Sistem kolaboratif juga mencakup pemetaan bahaya di setiap zona wisata, penyusunan standar operasional keselamatan, penetapan jalur evakuasi, pelatihan pengelola, penyediaan sarana keselamatan, dan forum koordinasi lintas instansi. Dengan desain yang jelas, keselamatan wisatawan dapat menjadi bagian integral dari pengalaman wisata sekaligus meningkatkan citra destinasi dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai kondisi tata kelola keselamatan di Goa Tengkorak dan merumuskan model pengelolaan risiko yang aplikatif. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, pedoman operasional bagi pengelola, serta panduan edukasi bagi wisatawan, sehingga destinasi ini dapat berkembang secara aman, tertib, dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penulis berfokus pada kesenjangan antara potensi wisata Goa Tengkorak dan belum kuatnya tata kelola keselamatan di lapangan. Destinasi ini memiliki nilai sejarah, budaya, dan potensi ekonomi daerah karena memuat tinggalan masyarakat Paser pada masa Kerajaan Sadurengas. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem keselamatan yang memadai. Beberapa aspek penting seperti SOP keselamatan, sistem mitigasi risiko, fasilitas P3K, jalur evakuasi, rambu peringatan, dan kesiapan pengelola dalam tanggap darurat masih perlu diperkuat. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas keselamatan wisatawan pada wisata gua, rafting, pantai, dan kawasan berisiko tinggi. Akan tetapi, sebagian besar kajian masih menekankan aspek teknis keselamatan, kepatuhan terhadap SOP, atau perlindungan hukum bagi wisatawan. Kajian tersebut belum banyak membahas bagaimana keselamatan wisata dikelola sebagai persoalan tata kelola lintas aktor, terutama pada destinasi gua yang memiliki risiko khas seperti ruang gelap, sempit, lembap, curam, dan sulit dijangkau ketika terjadi keadaan darurat.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian ini terletak pada terbatasnya kajian yang menghubungkan keselamatan wisata gua dengan pendekatan *collaborative governance*. Goa Tengkorak tidak hanya membutuhkan perbaikan fasilitas fisik, tetapi juga memerlukan koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola lokal, masyarakat, aparat kedaruratan, tenaga kesehatan, dan wisatawan. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut dengan menganalisis tata kelola risiko keselamatan wisatawan secara lebih menyeluruh serta merumuskan rekomendasi yang aplikatif bagi pengelolaan Goa Tengkorak di Kabupaten Paser.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena Goa Tengkorak memiliki risiko fisik yang nyata, sementara pola pengelolaannya belum memperlihatkan sistem keselamatan yang matang. Jika penelitian ini tidak dilakukan, pemerintah daerah dan pengelola lokal akan kehilangan dasar empiris untuk memahami titik rawan, kelemahan prosedur, dan kebutuhan intervensi keselamatan yang mendesak. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar penyusunan SOP wisata minat khusus, penguatan pelatihan pemandu lokal, pembenahan jembatan gantung, pemasangan rambu, penyediaan peta evakuasi, dan pembentukan unit keselamatan desa. Secara akademik, penelitian ini memperluas penerapan *collaborative governance* pada isu keamanan dan keselamatan pariwisata alam berbasis gua.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh sejumlah kajian terdahulu yang membahas keselamatan wisatawan, manajemen risiko, dan tata kelola destinasi pada objek wisata berisiko tinggi. Saptadi et al. (2021), misalnya, meneliti manajemen risiko K3 di wisata Gua Pindul dengan pendekatan HIRARC dan observasi lapangan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa destinasi gua memiliki karakter risiko yang spesifik, sehingga pengelola perlu melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian secara sistematis. Temuan ini relevan dengan Goa Tengkorak karena keduanya sama-sama berada pada ruang wisata gua yang memiliki potensi bahaya fisik bagi pengunjung.

Pembahasan mengenai risiko teknis tersebut diperkuat oleh Rohmah (2019) yang meneliti keamanan dan keselamatan pada wisata rafting. Meskipun objeknya berbeda, yaitu wisata arung jeram, penelitian ini memiliki kedekatan karena sama-sama membahas wisata petualangan yang menuntut prosedur keselamatan ketat. Rohmah menegaskan bahwa keberadaan SOP, arahan keselamatan, perlengkapan standar, dan kesiapan petugas lapangan menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kecelakaan. Dengan demikian, kajian Saptadi et al. dan Rohmah sama-sama menunjukkan bahwa destinasi berisiko tinggi tidak cukup hanya mengandalkan daya tarik alam, tetapi harus memiliki sistem keselamatan yang terencana. Selanjutnya, Fitriani (2024) memperluas pembahasan keselamatan wisata melalui kajian tata kelola keselamatan di kawasan Dieng. Penelitian ini menekankan bahwa keselamatan pada kawasan berisiko tinggi tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga pada koordinasi antaraktor, prosedur tanggap darurat, dan kesiapan kelembagaan. Kajian ini penting bagi penelitian Goa Tengkorak karena persoalan keselamatan di destinasi gua tidak hanya terletak pada medan yang berbahaya, tetapi juga pada bagaimana pemerintah, pengelola, masyarakat, dan pihak kedaruratan membangun sistem pengelolaan yang jelas.

Dari sisi normatif dan standar pelayanan, Soleheh dan Auliana (2009) menunjukkan bahwa keamanan dan keselamatan wisatawan merupakan bagian dari hak wisatawan yang harus dilindungi oleh pengelola dan pemerintah. Sementara itu, Aisyah dan Fadhillah (2023) menekankan pentingnya standarisasi layanan, SOP, dan pelatihan sumber daya manusia dalam menjamin keamanan wisatawan. Kedua kajian ini memperkuat argumen bahwa keselamatan wisata tidak dapat diserahkan pada kebiasaan lapangan semata, tetapi perlu didukung oleh aturan, standar, dan kapasitas pengelola.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih menekankan aspek teknis keselamatan, kepatuhan SOP, perlindungan hukum, dan standar layanan. Kajian yang secara khusus menempatkan wisata gua sebagai ruang risiko yang perlu dikelola melalui *collaborative governance* masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah tata kelola risiko keselamatan wisatawan di Goa Tengkorak secara lebih menyeluruh, terutama melalui peran pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola lokal, masyarakat, aparat kedaruratan, tenaga kesehatan, dan wisatawan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara konteks empiris, pendekatan teori, dan orientasi kebijakan dalam pengelolaan keselamatan wisata berbasis risiko tinggi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek teknis keselamatan seperti penerapan SOP, identifikasi bahaya, atau standar pelayanan wisata secara parsial, penelitian ini menempatkan isu keselamatan wisata gua dalam kerangka *collaborative governance* yang melibatkan interaksi multi-aktor secara simultan. Secara empiris, penelitian ini secara spesifik mengkaji Goa Tengkorak di Kabupaten Paser sebagai destinasi wisata gua yang memiliki kombinasi risiko fisik ekstrem, nilai sejarah, dan pengelolaan berbasis masyarakat yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Secara konseptual, penelitian ini memperluas penerapan teori *collaborative governance* tidak hanya sebagai model koordinasi kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen analisis kelemahan sistem keselamatan destinasi wisata. Secara praktis, kebaruan penelitian ini menghasilkan rekomendasi model tata kelola risiko yang bersifat aplikatif, termasuk kebutuhan penyusunan SOP wisata minat khusus dan penguatan regulasi daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan keselamatan wisatawan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga berorientasi pada formulasi model tata kelola yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola risiko keamanan dan keselamatan wisatawan pada Objek Wisata Goa Tengkorak di Kabupaten Paser.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena persoalan keselamatan wisatawan di Goa Tengkorak tidak hanya berkaitan dengan jumlah fasilitas atau kondisi fisik, tetapi juga menyangkut praktik koordinasi, kebijakan, kapasitas aktor, dan pengalaman langsung di lapangan. Peneliti membutuhkan data yang mampu menjelaskan proses, makna, dan dinamika tata kelola secara utuh. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen regulasi, catatan kelembagaan, informasi destinasi, dokumentasi lapangan, dan literatur yang relevan. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* karena penelitian memerlukan narasumber yang memahami pengelolaan, pengawasan, serta pengalaman penggunaan layanan keselamatan di Goa Tengkorak (Simangunsong, 2017).

Informan penelitian meliputi unsur Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagai regulator, pengelola operasional atau masyarakat lokal sebagai pelaksana di lapangan, unsur kedaruratan seperti BPBD, SAR, atau puskesmas sebagai aktor respons insiden, serta pengunjung sebagai pengguna layanan. Pemilihan informan tersebut memberi gambaran dari sisi kebijakan, operasional, kedaruratan, dan pengalaman wisatawan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali regulasi, koordinasi, hambatan, dan praktik keselamatan. Observasi diarahkan pada kondisi rambu, jembatan gantung, anak tangga, penerangan, alat pelindung diri, pos P3K, jalur evakuasi, dan perilaku pengelola maupun wisatawan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan melalui bukti visual dan dokumen pendukung.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Tahap pertama adalah reduksi data untuk memilih informasi yang paling relevan dengan tata kelola, manajemen risiko, dan kesiapsiagaan darurat. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi dan matriks temuan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tata Kelola Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Goa Tengkorak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keamanan dan keselamatan wisatawan di Goa Tengkorak belum berjalan secara terstruktur. Pola pengelolaan masih bersifat sektoral dan bergantung pada inisiatif informal masyarakat lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan regulasi dan anggaran, tetapi belum terlihat adanya desain kelembagaan yang secara khusus mengintegrasikan

Disporapar, BPBD, pemerintah desa, pengelola lokal, dan tenaga kesehatan dalam satu sistem keselamatan destinasi.

Dilihat dari *collaborative governance*, kondisi awal pengelolaan menunjukkan ketimpangan sumber daya. Pemerintah daerah memiliki otoritas formal, sedangkan masyarakat lokal lebih dekat dengan aktivitas harian destinasi. Namun, masyarakat belum memiliki kapasitas teknis keselamatan yang memadai. Ketimpangan ini menimbulkan ruang kosong tanggung jawab. Pemerintah mengandaikan masyarakat mampu menjaga kawasan, sedangkan masyarakat tidak memiliki kewenangan dan fasilitas yang cukup untuk memperbaiki infrastruktur atau membangun sistem kedaruratan. Desain kelembagaan juga belum kuat. Belum ditemukan wadah koordinasi formal yang menetapkan peran tiap aktor, alur komunikasi, standar pelaporan insiden, dan mekanisme evaluasi keselamatan. Ketiadaan SOP membuat pengelolaan lebih banyak berjalan berdasarkan kebiasaan, bukan prosedur tertulis. Kondisi ini melemahkan akuntabilitas karena tidak ada standar yang dapat dijadikan rujukan bersama.

3.2. Implementasi Manajemen Risiko Operasional

Implementasi manajemen risiko di Goa Tengkorak belum berjalan memadai. Identifikasi bahaya belum dilakukan secara sistematis. Padahal, kawasan ini memiliki beberapa titik risiko, seperti jembatan gantung, jalur anak tangga vertikal, area tebing karst, lorong sempit, rongga goa gelap, dan area artefak tengkorak. Risiko yang mungkin terjadi mencakup terpeleset, jatuh dari ketinggian, tersesat, luka akibat batu tajam, gangguan hewan beracun, serta cedera saat proses evakuasi. Temuan observasi menunjukkan banyak indikator keselamatan belum terpenuhi. Papan informasi destinasi tidak berfungsi sebagai media edukasi risiko. Safety briefing tidak dilakukan secara konsisten. Alat pelindung diri seperti helm dan senter kepala belum menjadi kewajiban. Pembatasan kapasitas kunjungan belum terlihat. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengendalian administratif, pengendalian teknis, dan pengendalian perilaku.

Jembatan gantung menjadi salah satu titik kritis. Struktur yang lapuk, berlubang, dan sempit tidak hanya membahayakan wisatawan saat masuk ke kawasan, tetapi juga menghambat proses evakuasi apabila terjadi kecelakaan. Fasilitas hiburan buatan yang terbengkalai di zona bawah juga berpotensi menjadi bahaya sekunder. Di dalam goa, penempatan artefak tengkorak tanpa proteksi fisik menimbulkan risiko ganda, yaitu risiko keselamatan pengunjung dan risiko kerusakan benda bernilai sejarah. Kajian internasional juga menegaskan bahwa pengelolaan risiko pariwisata harus dilakukan melalui perencanaan pra-krisis, kesiapsiagaan, koordinasi aktor, dan evaluasi berkelanjutan. Faulkner (2001) dan Ritchie (2004) menekankan pentingnya kerangka manajemen bencana dan krisis dalam destinasi wisata, sedangkan Orchiston (2013), Jiang et al. (2019), serta Sunkar et al. (2022) menunjukkan bahwa kesiapan pelaku wisata, pemetaan bahaya, dan daya dukung destinasi menjadi unsur penting dalam mengurangi risiko pengunjung. Temuan tersebut relevan dengan Goa Tengkorak karena destinasi gua berisiko tinggi membutuhkan SOP keselamatan, jalur evakuasi, pembatasan kapasitas, pelatihan pengelola, dan koordinasi lintas sektor.

3.3. Kesiapsiagaan Darurat dan Respons Medis

Kesiapsiagaan darurat di Goa Tengkorak masih lemah. Tidak tersedia pos medis, kotak P3K standar, sistem komunikasi darurat, pemandu bersertifikat, maupun peralatan evakuasi seperti tandu lipat dan spinal board. Dalam destinasi dengan jalur curam dan akses terbatas, ketiadaan fasilitas dasar tersebut memperbesar risiko fatal jika wisatawan mengalami cedera. Kelemahan utama tidak hanya terletak pada barang atau fasilitas, tetapi juga pada kapasitas manusia. Pengelola lokal belum mendapatkan pelatihan Medical First Responder dan evakuasi vertikal. Apabila terjadi cedera berat, misalnya patah tulang atau cedera tulang belakang akibat jatuh dari anak tangga, penanganan tanpa

teknik imobilisasi yang tepat dapat memperparah kondisi korban. Karena itu, pelatihan dasar kedaruratan perlu diposisikan sebagai kebutuhan minimum pengelolaan wisata gua. Koordinasi respons juga belum terstruktur. Jalur rujukan medis, titik kumpul, prosedur pelaporan insiden, dan pembagian peran antarinstansi belum tertulis secara jelas. Akibatnya, respons kedaruratan berpotensi bergantung pada improvisasi warga. Model seperti ini tidak cukup untuk destinasi yang memiliki risiko fisik tinggi dan akses medan yang sulit.

3.4. Kewajiban Hukum dan Pemenuhan Hak Perlindungan Wisatawan

Tata kelola keselamatan di lapangan saat ini belum memenuhi prinsip hukum dan hak wisatawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 20 UU Kepariwisataan menjamin hak wisatawan atas perlindungan hukum dan keselamatan, termasuk perlindungan asuransi untuk kegiatan berisiko tinggi, sementara Pasal 26 mewajibkan penyelenggara menyediakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Namun, hasil wawancara menunjukkan wisatawan tidak pernah menerima *briefing* keselamatan (*safety briefing*), tidak ada prosedur registrasi atau pembatasan jumlah pengunjung, serta tidak tersedia Alat Pelindung Diri (helm, *headlamp*) maupun fasilitas P3K di lokasi.

Observasi lapangan mengungkapkan bahwa infrastruktur krusial seperti jembatan gantung, tangga kayu, dan jalur vertikal berada dalam kondisi lapuk dan berisiko ambruk. Penanganan darurat sangat terbatas karena tidak ada pos medis atau pemandu bersertifikasi untuk evakuasi. Dokumentasi visual memperkuat temuan ini, menegaskan bahwa area kritis masih rentan dan tidak diawasi secara sistematis. Kesenjangan ini menunjukkan adanya kelalaian struktural (*institutional negligence*) di tingkat pemerintah daerah dan pengelola lokal, di mana prosedur keselamatan, regulasi turunan, dan SOP tidak diterapkan. Hal ini menempatkan wisatawan pada risiko tinggi, di mana mereka secara tidak sadar menanggung sendiri konsekuensi kecelakaan, biaya evakuasi, pengobatan, hingga risiko cacat atau kematian tanpa jaminan kompensasi dari pengelola. Dengan demikian, pemenuhan hak hukum wisatawan di Goa Tengkorak memerlukan intervensi strategis melalui penerapan SOP keselamatan yang terstruktur, penetapan jalur evakuasi, penyediaan fasilitas P3K, pelatihan pemandu lokal, serta integrasi asuransi kecelakaan. Langkah-langkah ini diperlukan agar destinasi tidak hanya mematuhi kewajiban hukum, tetapi juga menciptakan pengalaman wisata yang aman dan berkelanjutan.

3.5 Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas Tata Kelola

Pemahaman terhadap efektivitas tata kelola keselamatan di Goa Tengkorak perlu dilihat melalui faktor pendorong dan penghambat yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendorong utama berasal dari nilai sejarah dan budaya Goa Tengkorak sebagai kawasan yang memiliki artefak tengkorak dan tulang belulang peninggalan masyarakat Paser. Nilai ini membuat Goa Tengkorak tetap memiliki daya tarik bagi wisatawan dan menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain itu, partisipasi warga Desa Kasungai yang secara sukarela menjaga kawasan dan beraktivitas di sekitar pintu masuk juga menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan destinasi. Jika diarahkan melalui pembinaan pemerintah, partisipasi warga dapat dikembangkan menjadi bagian dari sistem pengelolaan dan keamanan destinasi.

Namun, faktor penghambat masih lebih dominan dibandingkan faktor pendorong. Hasil wawancara dengan pengunjung dan masyarakat menunjukkan bahwa wisatawan tidak pernah menerima safety briefing sebelum melakukan pendakian. Pengunjung juga bebas masuk tanpa registrasi identitas, tanpa penapisan kondisi kesehatan, dan tanpa pembatasan kapasitas jumlah pengunjung di dalam goa. Narasumber juga menyebutkan tidak ada penyediaan atau kewajiban penggunaan APD seperti helm, headlamp, maupun sepatu keselamatan. Wisatawan hanya mengandalkan pakaian bebas, sandal, dan lampu kilat dari telepon genggam ketika memasuki area yang gelap.

Temuan observasi memperkuat hasil wawancara tersebut. Pada aspek sarana-prasarana, rambu keselamatan tidak tersedia secara memadai, papan informasi destinasi dalam kondisi kosong, jalur evakuasi medis tidak ditemukan, dan penerangan di area anak tangga maupun rongga goa tidak tersedia. Fasilitas P3K juga tidak ditemukan di area loket, pos, maupun kios masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen risiko belum dijalankan secara sistematis, terutama pada aspek pencegahan, pengendalian bahaya, dan kesiapsiagaan darurat.

Faktor penghambat lain terlihat dari lemahnya kapasitas pengelola dan belum adanya sistem tanggap darurat yang sesuai. Dalam lampiran observasi, pengelola tidak memberikan briefing keselamatan, tidak menggunakan APD, respons terhadap situasi berisiko masih lambat, dan tindakan di lapangan belum sesuai SOP. Dari sisi wisatawan, masih ditemukan perilaku berisiko seperti memanjat atau menyentuh area terlarang karena kurangnya pengawasan dan arahan dari pengelola. Dokumentasi juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat Peraturan Daerah terkait wisata, aturan tersebut belum menjadi dasar operasional dalam menghidupkan kembali pengelolaan Goa Tengkorak. SK pembentukan pengelola juga tidak tersedia.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan tata kelola keselamatan tidak hanya terletak pada kurangnya fasilitas, tetapi juga pada belum kuatnya sistem manajemen keselamatan di tingkat pelaksana lapangan. Herdiansyah dan Lubis (2024) menegaskan bahwa keselamatan kerja lapangan membutuhkan pelatihan keselamatan, keterlibatan petugas, komunikasi risiko, serta penerapan aturan dan prosedur keselamatan secara konsisten. Oleh karena itu, pengelola Goa Tengkorak perlu dibekali prosedur kerja, simulasi tanggap darurat, dan pelatihan dasar keselamatan agar mampu menghadapi kondisi berisiko secara lebih terukur.

Dengan demikian, efektivitas tata kelola keselamatan Goa Tengkorak masih terhambat oleh tiga persoalan utama, yaitu keterbatasan anggaran pemeliharaan dan mitigasi, rendahnya kompetensi teknis keselamatan pengelola, serta lemahnya budaya keselamatan wisatawan. Pengelolaan masih bersifat reaktif dan sporadis karena belum didukung SOP baku, fasilitas keselamatan, sistem evakuasi, serta koordinasi kelembagaan yang jelas. Oleh sebab itu, perbaikan tata kelola perlu diarahkan pada penyusunan SOP keselamatan, pembentukan struktur pengelola resmi, penyediaan rambu dan P3K, pelatihan tanggap darurat bagi warga atau pengelola lokal, serta penguatan edukasi keselamatan bagi wisatawan.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan Utama Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keamanan dan keselamatan wisatawan di Goa Tengkorak masih bersifat reaktif dan sporadis, dengan ketiadaan SOP baku, fasilitas P3K, briefing keselamatan, dan kerusakan infrastruktur vital seperti jembatan gantung. Temuan ini sejalan dengan Saptadi et al. (2021) yang menekankan pentingnya identifikasi bahaya dan pengendalian risiko pada wisata gua, serta Rohmah (2019) yang menunjukkan bahwa keberadaan SOP dan perlengkapan keselamatan sangat menentukan keamanan pengunjung. Namun, berbeda dengan objek penelitian sebelumnya, karakteristik risiko di Goa Tengkorak lebih kompleks karena melibatkan akses vertikal curam, lorong sempit, penerangan minim, dan artefak sejarah yang harus dilindungi, sehingga tata kelola keselamatan tidak hanya teknis tetapi juga perlu mempertimbangkan konservasi budaya dan mitigasi risiko fisik secara bersamaan.

Penelitian ini memperkuat temuan Fitriani (2024) terkait perlunya koordinasi antaraktor dalam kawasan berisiko tinggi, di mana kesiapsiagaan darurat dan kompetensi SDM menjadi faktor kunci. Observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan di Goa Tengkorak menunjukkan bahwa peran warga lokal sebagai pengawas informal dan partisipasi pemerintah daerah belum terstruktur secara formal. Hal ini menolak kesan beberapa penelitian terdahulu yang menempatkan regulasi atau perlindungan hukum sebagai faktor utama, karena di lapangan implementasi nyata masih lemah dan

risiko kecelakaan tetap tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya model *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah, pengelola, masyarakat, dan wisatawan untuk menciptakan tata kelola risiko yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan Menarik Lainnya penulis menemukan dua faktor pendorong utama. Pertama, Goa Tengkorak memiliki nilai sejarah dan kultural yang kuat karena berkaitan dengan peninggalan masyarakat Paser pada masa Kerajaan Sadurengas. Nilai ini menjadi modal sosial untuk menjaga eksistensi destinasi. Kedua, masyarakat Desa Kasungai masih menunjukkan kesediaan berpartisipasi secara swadaya, terutama dalam menjaga akses kawasan dan mendampingi aktivitas wisata secara informal. Faktor penghambat lebih dominan. Keterbatasan anggaran mitigasi sering menjadi alasan belum optimalnya perbaikan infrastruktur. Kompetensi K3 pengelola lokal juga masih rendah. Di sisi lain, paradigma pembangunan pariwisata masih cenderung mengutamakan fasilitas fisik dan daya tarik visual dibandingkan investasi pada perangkat keselamatan, seperti SOP, pelatihan, peta evakuasi, rambu, dan sistem pelaporan insiden. Budaya keselamatan wisatawan juga menjadi tantangan. Sebagian pengunjung cenderung memasuki area berisiko tanpa pemahaman memadai tentang bahaya medan. Tanpa briefing, rambu, dan pengawasan, perilaku wisatawan dapat memperbesar peluang kecelakaan. Karena itu, perbaikan tata kelola perlu menyasar dua sisi sekaligus, yaitu kesiapan pengelola dan disiplin wisatawan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa tata kelola risiko keamanan dan keselamatan wisatawan di Objek Wisata Goa Tengkorak belum berjalan secara kolaboratif, sistematis, dan berbasis prosedur. Pemerintah Kabupaten Paser belum memiliki regulasi turunan dan SOP spesifik untuk wisata gua berisiko tinggi. Pengelolaan masih bersifat sektoral, informal, dan reaktif. Implementasi manajemen risiko serta kesiapsiagaan darurat juga belum memadai. Identifikasi bahaya belum dilakukan secara formal. Safety briefing, pembatasan kapasitas, penggunaan alat pelindung diri, peta evakuasi, fasilitas P3K, pos medis, pemandu bersertifikat, dan jalur rujukan darurat belum tersedia secara layak. Kondisi jembatan gantung, anak tangga, dan area goa memperlihatkan kebutuhan intervensi keselamatan yang mendesak. Guna memperbaiki kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang SOP keselamatan wisata minat khusus, merehabilitasi jembatan gantung dan jalur pendakian, memasang rambu serta peta evakuasi, membentuk satuan tugas keselamatan desa, memberikan pelatihan *Medical First Responder* dan evakuasi vertikal, serta membangun sistem koordinasi lintas sektor antara Disporapar, BPBD, Dinas Kesehatan, pemerintah desa, pengelola lokal, dan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya berfokus pada satu destinasi, yaitu Goa Tengkorak. Penelitian juga bergantung pada data lapangan yang tersedia selama masa penelitian, sehingga dinamika terbaru setelah penelitian berlangsung belum seluruhnya tercakup.

Arah Masa Depan Penelitian. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan kajian komparatif pada beberapa destinasi gua atau wisata minat khusus di Kalimantan Timur. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat risiko, persepsi keselamatan wisatawan, dan efektivitas intervensi SOP setelah diterapkan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, masyarakat dan pengelola lokal di Desa Kasungai, informan penelitian, dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S., & Fadhillah, R. (2023). Analisis standard keamanan wisata alam di Pelaruga. JIPSI (Jurnal Ilmiah Pariwisata Imelda), 1(1), 38–41. https://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPSI/article/view/1205

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023). Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan. Nasmedia, Klaten. ISBN 978-623-155-142-9

Faulkner, B. (2001). Towards a framework for tourism disaster management. Tourism Management, 22(2), 135–147. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00048-0

Fitriani, V. A., Fitriyah., & Alfirdaus, L. K. (2024). TATA KELOLA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PADA SEKTOR PARIWISATA: STUDI WISATA DIENG. Journal of Politic and Government Studies, 13(2), 654-666. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43704

Herdiansyah, R., & Lubis, B. (2024). Manajemen keamanan dan keselamatan tenaga kerja lapangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17057

Jiang, Y., Ritchie, B. W., & Benckendorff, P. (2019). Bibliometric visualisation: An application in tourism crisis and disaster management research. Current Issues in Tourism, 22(16), 1925–1957. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1408574

Mulyana, M., & Fanggi, D. C. (2022). Peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan objek wisata Pantai Lasiana di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), 4(1), 37–53. https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i1.2450

Orchiston, C. (2013). Tourism business preparedness, resilience and disaster planning in a region of high seismic risk: The case of the Southern Alps, New Zealand. Current Issues in Tourism, 16(5), 477–494. https://doi.org/10.1080/13683500.2012.741115

Ritchie, B. W. (2004). Chaos, crises and disasters: A strategic approach to crisis management in the tourism industry. Tourism Management, 25(6), 669–683. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.09.004

Rohmah, Z. M. (2019). Analisis Keamanan dan Keselamatan Wisatawan pada Wisata Rafting. In Jurnal Administrasi Bisnis (Vol. 73, Issue 2, pp. 122–131). https://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2936

Saptadi, J., Arianto, M., & Habibi, A. (2021). Manajemen Risiko K3 di Wisata Gua Pindul, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati, 6, 154. https://doi.org/10.35842/formil.v6i2.358

Simangunsong, F. (2017). Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik dan inovatif (Cet. 3). Alfabeta.

Soleheh, D. A., & Auliana, D. (2009). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI OBYEK WISATA PANTAI ANYER DITINJAU DARI UU NOMOR 1 1, 55–62. https://e-jurnal2.lppmunsera.org/index.php/senaskah/article/view/36

Sumakul, Z. A., Suradinata, E., & Supriyadi, B. (2021). Kinerja Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 12(4), 807–815. https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.341

Sunkar, A., Lakspriyanti, V., Wibowo, F. A. C., & Haryono, E. (2022). Geotourism hazards and carrying capacity in geosites of Sangkulirang-Mangkalihat Karst, Indonesia. Sustainability, 14(3), 1704. https://doi.org/10.3390/su14031704